



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Tunggakan Pajak DD Dan ADD Rp 60 Juta

KOTA MANNA - Meskipun sudah tahun 2023, nyatanya masih ada desa yang belum melunasi pajak Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) mencapai Rp 60 juta. Pajak yang belum dibayar tersebut merupakan pajak kegiatan anggaran DD dan ADD tahun 2021.

Inspektur Inspektorat Kabupaten BS Hamdan Syarbaini S.Sos membenarkan masih ada desa yang belum melunasi tunggakan pajak DD dan ADD tahun 2021 tersebut. Yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang jika ditotalkan pajak DD dan ADD yang belum terbayar mencapai Rp 60 juta.

Meskipun tidak disebutkan beberapa desa yang menunggak tersebut, Hamdan memastikan jumlah tunggakan masih tinggi. "Tunggakan tersebut tahun 2021, berdasarkan data dari Inspektorat," kata Hamdan

Lanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan pada awal tahun 2022 lalu total tunggakan pajak kegiatan desa mencapai Rp 301 juta. Hanya saja, di tahun lalu sudah ada beberapa desa yang telah melunasi.

Sayangnya, hingga pertengahan Januari 2022, masih saja ada desa yang belum melunasi pajak 2021. Padahal, peringatan dari Inspektorat sudah beberapa kali disampaikan. "Kalau dari pantauan kami (Inspektorat) pajak yang tidak dibayar tersebut yakni pajak pembelian barang dan jasa serta pajak makan minum," ujar Hamdan.

Sebagai langkah serius Inspektorat mengancam akan audit khusus. Apabila tahun anggaran 2022 masih ada desa yang menunggak pajak kegiatan, dipastikan akan dilakukan audit oleh tim Inspektorat.

Mengingat, saat ini sedang dilakukan pengecekan terkait PPN dan PPh pada penggunaan APBDes tahun 2022. Apalagi, jika sampai ada desa yang sebelumnya telah kedapatan menunggak namun tahun 2022 kedapatan nunggak lagi pajaknya. "Kami pantau dulu, jangan sampai tahun 2022 masih ada yang nunggak," tegas Hamdan. (tek)